

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Satu dari beberapa agenda mengenai reformasi secara total di Indonesia sendiri diketahui terealisasinya *good governance* dengan secara keseluruhan sebagai upaya untuk diwujudkan Indonesia baru. Secara harus diakui bahwa mengenai *good governance* saat ini telah menjadi suatu tuntutan bagi Indonesia. Kemudian terkait satu dari beberapa agenda reformasi yang berupaya dilaksanakan oleh pihak-pihak pemerintah yakni berupa reformasi manajemen keuangan sebagai usahanya untuk direalisasikannya *good governance* dalam upaya pengelolaan mengenai keuangan negara maupun pada keuangan di wilayah daerah. (Cahyadi,2012)

Sehubungan dengan hadirnya upaya reformasi, diketahui pemerintah telah berupaya mengeluarkan mengenai data undang-undang yang sifatnya sangat penting dengan dapat dipahami bahwa sistem pemerintahan di wilayah pusat, daerah, dan juga sistem yang memiliki keterkaitan pada keuangan antara pemerintah di wilayah pusat dan juga daerah. Kedua undang-undang tersebut tercakup pada undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang membahas terkait pemerintahan dan undang-undang nomor 25 tahun 1999 membahas terkait upaya penimbangan terkait keuangan pemerintahan di wilayah pusat dan daerah, dengan diketahui telah dilakukan perubahan menjadi undang-undang nomor 32 dan 33 tahun 2004. Pada upaya dilaksanakannya otonomi dan juga upaya desentralisasi dalam upaya pembangunan secara perlu dilakukannya dengan terencana dan juga secara sistematis sehingga terkait upaya pemberian otonomi dan juga desentralisasi pada bidang keuangan secara harus ditempuh agar upaya pembangunan dapat dilaksanakan dengan efisien dan menyesuaikan pada harapan dari masyarakat. (Cahyadi, 2012)

Diketahui 1 dari beberapa instrumen yang dapat diaplikasikan untuk dapat meninjau terkait Seberapa jauh kemampuan yang dimiliki wilayah daerah dalam upaya melaksanakan aktivitas pembangunan dan juga aktivitas di wilayah pemerintahan dalam usahanya menghadirkan suatu pelayanan terhadap masyarakat yakni melalui upaya penyusunan APBD atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sebagai upaya perencanaan pembangunan daerah yang diketahui telah tertuang dalam wujud angka, masyarakat atau wilayah publik diketahui berperan sebagai pihak yang sifatnya penting atau berkepentingan dalam proses disusunnya anggaran daerah. Hal tersebut sebab hakikatnya terkait anggaran daerah atau APBD diketahui menjadi suatu realisasi dari amanat rakyat kepada pihak-pihak di wilayah eksekutif

untuk dapat ditingkatkannya kesejahteraan dan juga pelayanan secara umum bagi pihak-pihak masyarakat dengan diketahui dalam batasan otonomi daerah yang dimiliki. Pada upaya penyelenggaraan anggaran daerah diketahui memang tidak dapat diserahkan dengan sepenuhnya kepada pihak eksekutif, tetapi secara harus merupakan suatu bentuk kebersamaan antara pihak eksekutif dan, legislatif dan juga masyarakat dalam pemahaman luas atau meliputi perwakilan dari warga dan agama pemuka ada, tokoh yang berperan di masyarakat, kalangan akademis dan LSM. Diketahui terkait kesadaran dalam upaya pelaksanaan atau penyelenggaraan anggaran daerah menjadi bagian dari amanat rakyat yang sifatnya sangat penting bagi terealisasinya akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan mengenai keuangan daerah. (Cahyadi, 2012).

Kinerja keuangan dipahami sebagai satu dari beberapa isu yang sifatnya sangat penting untuk dapat dilakukan pengkajian pada organisasi sektor di wilayah publik dengan termasuk pemerintahan, sejak diaplikasikannya atau diterapkannya upaya penganggaran dalam basis kinerja, keseluruhan pemerintah diketahui memperoleh tuntutan untuk dapat secara mampu dihasilkannya suatu kinerja mengenai keuangan pemerintah dengan cara yang baik atau secara baik. Dengan meningkatnya tuntutan dari upaya pelaksanaan akuntabilitas publik oleh pihak-pihak organisasi sektor di wilayah publik seperti pemerintah di wilayah pusat dan daerah, unit-unit yang berkaitan dengan kerja pemerintah, yang berkaitan pula dengan departemen dan juga lembaga negara diketahui diharapkan dapat dikurangnya suatu aktivitas pemborosan, terkait kebocoran mengenai dana dan juga dideteksinya mengenai program yang diketahui tidak layak dalam sudut pandang ekonomi. 1 dari beberapa hal yang diketahui dapat berperan sebagai mekanisme atau alat untuk dapat melakukan penilaian mengenai pertanggungjawaban terhadap instansi pemerintah Yakni dengan dilihatnya kinerja mengenai keuangan melalui upaya perhitungan dan juga upaya analisis pencapaian terhadap target dan juga terkait realisasi dari upaya penerimaan dan juga pengeluaran atas APBD, baik melalui Sisi masukan, keluaran, atau outcome, terkait impact, dan juga benefit yang diterima. Upaya penilaian kinerja diketahui yang berkaitan dengan keuangan sifatnya sangat penting untuk dilaksanakan sebagai upaya untuk diketahuinya apakah Pengadilan Negeri Tebing Tinggi telah berupaya Melaksanakan program kerja secara baik. Sebagai upaya untuk menilai kinerja keuangan, Pengadilan Negeri Tebing Tinggi diharapkan dapat memperhatikan mengenai value for money dalam upaya menjalankan kegiatan atau aktivitasnya. (Isna, Ayu, 2015)

Value For Money dipahami sebagai konsep dalam upaya atau dimanfaatkan untuk melakukan penilaian mengenai kinerja suatu organisasi yang bergerak di wilayah publik atau sektor publik dengan diketahui tidak hanya ditinjau melalui segi keuangan, tetapi juga memanfaatkan aspek non keuangan sebagai upaya untuk dinilainya mengenai tingkat

keberhasilan yang dicapai dalam program kerja yang dicanangkan di wilayah sektor publik. Konsep dari value for money baju gamis sebagai suatu konsep untuk melakukan pengukuran terhadap ekonomi, terkait efektivitas dan juga terkait efisiensi mengenai kinerja program, aktivitas dan juga organisasi. Konsep tersebut diketahui sebagai suatu konsep yang sifatnya penting pada suatu organisasi di wilayah sektor publik sehingga kerap kali disebut juga sebagai bagian dari inti upaya pengukuran kinerja di wilayah sektor publik. VFM diketahui juga memiliki artian sebagai suatu bentuk Penghargaan terhadap nilai uang. Hal tersebut dapat dipahami bahwa tiap-tiap rupiah secara harus dihargai dengan layak dan juga. (Halim dan Kusufi ,2013:132).

Value For Money diketahui mencakup terkait penilaian mengenai efisiensi, terkait efektivitas dan dokumen dan juga terkait ekonomi dengan diukur melalui presentase rasio secara tertentu, jika didapatkan suatu nilai rasio yang berada pada posisi X lebih dari 100% menyajikan bahwa keadaan tersebut merupakan keadaan yang tidak diharapkan, kemudian apabila $X = 100\%$ dapat dipahami bahwa hasilnya berimbang, dan X yang berada pada posisi kurang dari 100% dapat dipahami bahwa kondisi tersebut merupakan kondisi yang diharapkan. Dengan pemahaman bahwa apabila presentase berada pada posisi di bawah 100% maka diketahui perusahaan dapat disebut sebagai efisien atau bernilai efisien, efektif dan juga ekonomis. (Hadi, 2010). *Value For Money* yang diketahui menjadi suatu mekanisme atau alat untuk melakukan penilaian mengenai apakah suatu organisasi telah mendapatkan tujuan yang telah dirumuskan atau sesuai dengan harapan. Konsep tersebut diketahui umumnya dikenal juga dengan konsep 3E yakni meliputi ekonomi, efisiensi, dan juga efektivitas. Value for money berupaya menjelaskan mengenai keterkaitan atau hubungan secara optimal antara biaya atau sumber daya serta terkait manfaat atau hasil yang diperoleh atau yang disampaikan melalui proses perubahan terhadap input melalui kegiatan yang menjadi output dengan dibutuhkannya untuk dapat dipicunya hasil (*outcome*) yang baik.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan adalah salah satu kabupaten dan merupakan ibu kota propinsi Kalimantan Utara, dilihat dari potensi ekonomi dilingkup provinsi Kalimantan Utara dan jika diurutkan menurut pertumbuhan ekonominya diketahui yang paling tertinggi berada pada kota Tarakan yakni tepatnya 6,23% dengan diketahui diikuti dari Kabupaten Tana Tidung yakni berada pada posisi angka 5,62%, terkait kabupaten Malinau diketahui berada pada posisi 4,75%, Kabupaten Bulungan sendiri berada pada posisi 4,53% dan diketahui Kabupaten Nunukan berada pada posisi 4,13%. (*Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulungan, 2023*), kabupaten bulungan berada di urutan keempat dan termasuk lambat dalam pertumbuhan ekonominya, Oleh karena itu mengkaji memiliki ketertarikan untuk

melaksanakan pengkajian di wilayah Kabupaten Bulungan dengan memanfaatkan analisis rasio keuangan yakni metode value for money untuk dapat diketahuinya Bagaimana kondisi atau keadaan secara sebenarnya mengenai kinerja keuangan di wilayah Kabupaten Bulungan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***“ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULUNGAN (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULUNGAN KALIMANTAN UTARA).***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

“Bagaimana kinerja keuangan dengan methode value for money pada pemerintah daerah Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara.”

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan pada pemerintah daerah Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah:

- a. Bagi penulis, untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang analisis kinerja keuangan pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara.
- b. Bagi Pemerintah Daerah kabupaten Bulungan, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menilai kinerja keuangan.
- c. Peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti tentang kinerja keuangan pemerintah daerah.